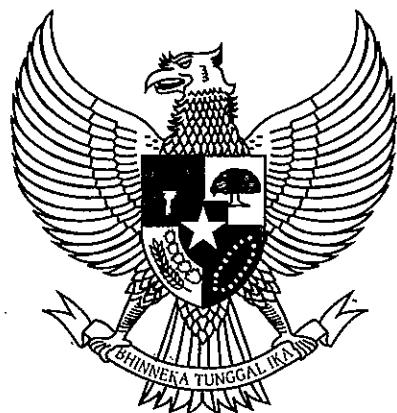


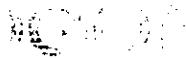
B  
S

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

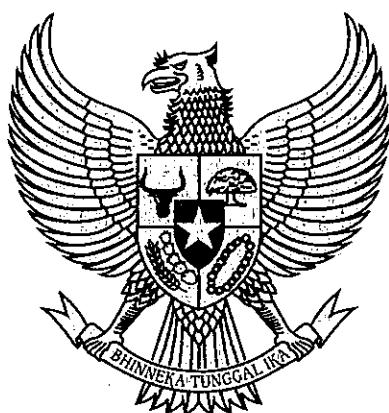
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA



.....  

|    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |    |     |
|----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| 10 | • | 10 | • | 15 | • | 1 | 2 | • | 3 | • | 00 | 049 |
|----|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## S E R T I P I K A T

HAK : Guna Bangunan No. 49

PROVINSI : Jawa Barat

KABUPATEN / KOTA : Bogor

KECAMATAN : Citeureup

D E S A / KELURAHAN : Tarikolot

DAFTAR ISIAN 307

No. ....

DAFTAR ISIAN 208

No. 68856 / 2010

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

Bogor

10 • 10 • 15 • 12 • 2 • 00049

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

|  |   |
|--|---|
| <p>a) HAK : Guna Bangunan<br/>No. : 49<br/>Desa / Kel. Tarikolot<br/>Tgl. berakhirnya hak :<br/>02-11-2030</p>   | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/><u>PT. NALCO INDONESIA</u><br/><u>Berkedudukan di Jakarta</u></p>   |
| <p>b) NIB 10.10.15.12.02117<br/>Letak Tanah</p>  | <p>Tanggal lahir / akta pendirian<br/>03-01-2009</p>  |
| <p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Konversi</u></li> <li>2. Pemberian hak Guna Bangunan</li> <li>3. <u>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</u></li> </ol>   | <p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Bogor ..... <b>05 NOV 2010</b><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Bogor .....<br/>ttd</p>   |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Isian 202<br/>Tgl.<br/>No.</li> <li>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah<br/>Tgl - 08-2010 BPN Provinsi Jawa Barat<br/>No. 930/HGB/BPN.32/2010</li> <li>3. Permohonan Pemecahan /<br/>Pemisahan / Penggabungan bidang<br/>Tgl 03-11-2010<br/>No. 68163/2010</li> </ol>  | <p>DJAMALUDDIN, SH., M.Hum.....<br/>NIP 19590509 199103 1 001</p>   |
| <p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl 7-10-2009<br/>No 1/Tarikolot/2009<br/>Luas 0.030 M2. ( Sembilan<br/>Ribu Tiga Puluh Meter<br/>Persegi ).</p>   | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bogor ..... <b>05 NOV 2010</b><br/>Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Bogor .....<br/><br/> <br/> <b>DJAMALUDDIN, SH., M.Hum.</b><br/> <b>NIP 19590509 199103 1 001</b> </p> |
| <p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanah Negara bekas HGB No. 5/Tarikolot</li> <li>- Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan ini, apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai dengan Site Plan yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ul> |   |

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

| Sebab perubahan,<br>Tanggal pendaftaran,<br>No. Daftar isian   | Nama yang berhak<br>dan<br>Pemegang hak lain-lainnya   | Tanda tangan Kepala kantor<br>dan Cap Kantor |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN</p> <p>DI 303 NO : 20949 TGL 06 MAR 2014</p>  |  |  |
| <p>GANTI NAMA<br/>Berdasarkan<br/>Pernyataan<br/>Keputusan Para<br/>Pemegang Saham<br/>PT. NALCO<br/>INDONESIA<br/>Nomor : 13.<br/>Tanggal 18/02/2014<br/>yang dibuat oleh<br/>EMMYRA FAUZIA<br/>KARIANA, SH, M.Kn<br/>Notaris di<br/>Jakarta, yang<br/>disyahkan oleh<br/>Menteri Hukum dan<br/>Hak Asasi Manusia<br/>Republik Indonesia<br/>Nomor. AHU-08861.<br/>AH.01.02.Tahun<br/>2014 Tanggal<br/>28/02/2014.</p> <p>Tgl: 01-04-2019<br/>No: 50010 /2019</p> | <p>PT. ECOLAB<br/>INTERNATIONAL<br/>INDONESIA,<br/>BERKEDUDUKAN<br/>DI BOGOR</p> <p>An. Kepala Kantor<br/>Pertanahan<br/>Kabupaten Bogor</p> <p>Kepala Seksi Hak Tanah<br/>dan Pertanahan Tanah</p>  <p>A. KARUNIAJAYA, SH, M.H.<br/>NIP 196208071983031006</p> |  |

## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

### **Halaman :**

|    |   |    |   |    |   |    |   |   |   |    |     |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|----|-----|
| 10 | • | 10 | • | 15 | • | 12 | • | 3 | • | 00 | 049 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|---|---|----|-----|

NIB : 10.10.15.12.02117

## SURAT UKUR

Nomor : 11/Tarikolot / 2009

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Citeureup

Desa / Kelurahan : Tarikolot

Peta : (Dasar Pendaftaran) Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 48.2-36.084-01-7 Kotak : C-D/3-4

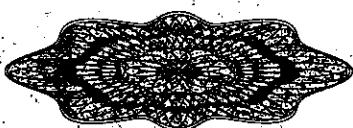
Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / Kosong

Tanda-tanda batas : Pilar

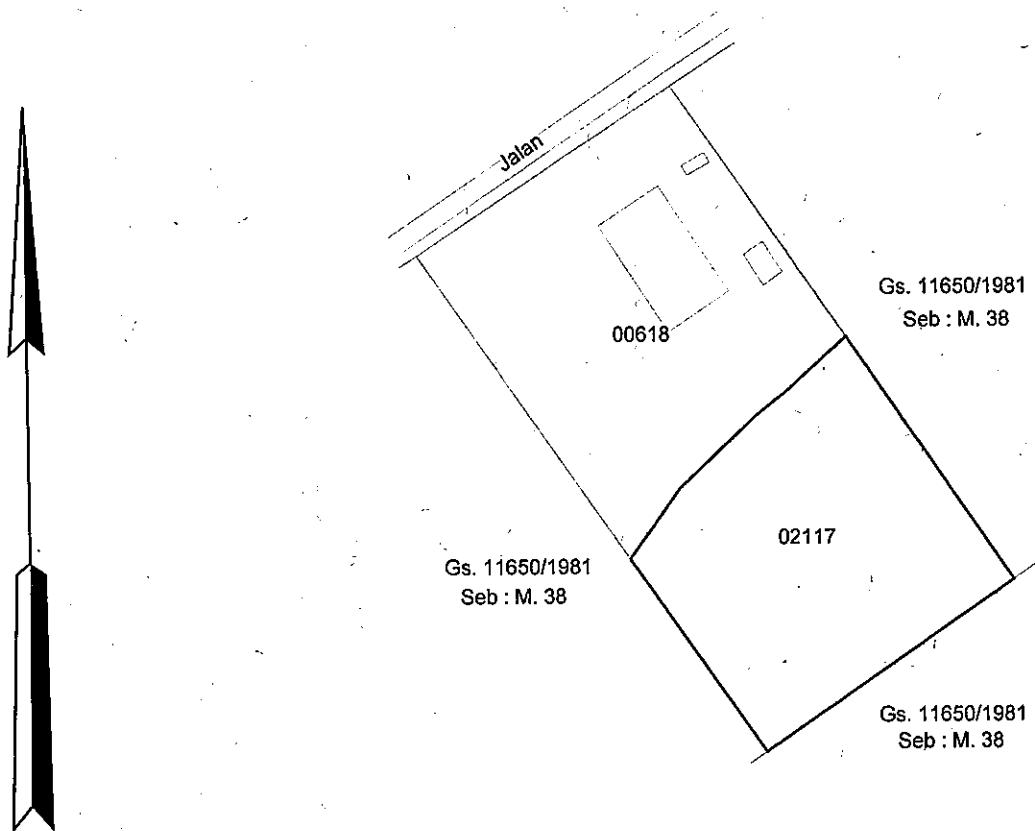
Luas : 9030 M<sup>2</sup> ( Sembilan ribu tiga puluh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan Batas oleh : Soleh

Penetapan Batas oleh : Ohim



SKALÀ 1 : 2500



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat ukur ini Salinan dari G.S.No. 5443/Tarikolot/1988

Pemohon : PT. NALCO PERKASA

Petugas Ukur : Ohim

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Daftar Isian 303 tgl. 27-10-2009

No. 24392

Bogor, Tgl. 27-10-2009

UNTUK SERTIPIKAT

BOGOR

05 NOV 2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

BOGOR

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Bogor

ttd

Ir. N. AGUS TARUNA

NIP. 19640805 199403 1 002

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang telah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

